



Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batam

Abdul Hafizt Arkan¹, Septa Diana Nabella^{2*}, Dewi Permata Sari³,
Andi Hidayatul Fadlilah⁴, M. Tarmizi⁵

¹⁻⁵Universitas Ibnu Sina, Batam, Indonesia

*Korespondensi penulis: septadiana1717@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of capital expenditure, intergovernmental transfers, and the level of regional financial independence on the financial performance of the Batam City Government during the 2022–2024 fiscal years. The research adopts a quantitative approach using secondary data derived from Budget Realization Reports, which are analyzed through multiple linear regression methods. The findings reveal that, partially, capital expenditure and intergovernmental transfers have a significant effect on regional financial performance. In contrast, the level of regional financial independence does not show a significant partial effect. However, when examined simultaneously, all three variables significantly influence financial performance. The statistical results indicate a significance value of 0.021 and a coefficient of determination of 0.683. This suggests that 68.3% of the variation in regional financial performance can be explained by the combined influence of capital expenditure, intergovernmental transfers, and regional financial independence. Overall, the results highlight that regional financial performance is closely related to the effectiveness of budget management and the degree of fiscal independence achieved by the local government.*

Keywords: *Budget Management; Capital Expenditure; Financial Independence; Financial Performance; Intergovernmental Transfers.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, transfer antar pemerintah, dan tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam selama tahun anggaran 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran, yang dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, belanja modal dan transfer antar pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, tingkat kemandirian keuangan daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,021 dan koefisien determinasi sebesar 0,683. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 68,3% variasi kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh kombinasi belanja modal, transfer antar pemerintah, dan kemandirian keuangan daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kinerja keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan anggaran serta tingkat kemandirian fiskal yang dicapai oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: Belanja Modal; Kemandirian Keuangan; Kinerja Keuangan; Manajemen Anggaran; Transfer Antar Pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana pengelolaan anggaran telah berjalan secara efektif dalam era desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah menetapkan target pertumbuhan ekonomi untuk memotivasi pemerintah dan departemen tingkat bawah agar berupaya mengembangkan ekonomi. Karena karakteristik investasi yang tinggi dan dampak pelayanan publik yang lambat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya, pejabat pemerintah daerah cenderung menginvestasikan sumber daya keuangan yang terbatas di bidang ekonomi, sehingga mengurangi investasi di bidang pelayanan publik. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara tepat dan efisien menjadi faktor kunci dalam

mencapai kinerja keuangan yang baik. (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan dengan status *Free Trade Zone*, Kota Batam berpotensi pada perekonomian dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022–2024, capaian pendapatan daerah masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, realisasi belanja modal juga menunjukkan pola yang tidak stabil. Sementara itu komposisi pendapatan daerah masih memiliki angka yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat (Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih belum sepenuhnya optimal.

Beberapa faktor fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, diantaranya belanja modal, dana perimbangan, dan tingkat kemandirian daerah. Belanja modal memiliki peran andil dalam meningkatkan pembangunan jangka panjang melalui penyediaan infrastruktur dan aset daerah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Sementara itu, dana perimbangan berfungsi sebagai mekanisme dalam mengikis kesenjangan fiskal beberapa daerah, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun tingkat kemandirian daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri. Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, efektivitas pengelolaan sumber daya daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kinerja keuangan (Fiskal, 2021).

Dalam berbagai penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan tingkat kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil yang diperoleh belum menunjukkan konsistensi karena masih ditemukan perbedaan temuan antar studi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah serta rentang waktu penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan belanja modal, dana perimbangan, dan tingkat kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam, guna memperoleh bukti empiris yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan periode penelitian yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah di Kota Batam. peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang,

"Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batam", tidak hanya sesuai dengan judulnya, tetapi juga memiliki alasan akademis dan praktis.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah konsep yang memfokuskan terkait kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut pemikiran Musgrave dan Oates, fungsi alokasi sumber daya publik akan lebih optimal apabila dikelola oleh pemerintah daerah karena lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat (Fiskal, 2021).

Fakta yang terjadi, selain keterkaitan desentralisasi fiskal dengan distribusi kewenangan, desentralisasi juga memiliki pengaruh terhadap kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif. Menurut penelitian (Miar et al., 2024), menunjukkan bahwa peningkatan kewenangan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kapasitas institusi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah masih mengandalkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini masih menjadi tantangan dalam implementasi desentralisasi fiskal. Terlihat pada angka rendahnya tingkat kemandirian fiskal di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan sendiri belum optimal (Azis & Husna, 2021). Selain itu, fenomena flypaper effect juga menunjukkan bahwa dana transfer cenderung lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan belanja produktif (Kanaiya & Mustanda, 2020).

Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kewenangan, kapasitas fiskal, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Penilaian terhadap kinerja tersebut tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah serta efisiensi dalam pengalokasian dan pemanfaatan belanja secara tepat guna dan optimal

(Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014).

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penilaian terhadap kinerja ini tidak hanya didasarkan pada besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga pada tingkat efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah serta efisiensi dalam penggunaan dan pengalokasian belanja secara tepat (Devinci Antasena et al., 2023).

Dengan demikian, kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengoptimalkan potensi pendapatan serta mengelola anggaran secara tepat sasaran.

Belanja Modal

Belanja modal berkaitan dengan dana keluran pemerintah daerah dalam memperoleh aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, gedung, dan peralatan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Belanja ini memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas ekonomi.

Secara konseptual, belanja modal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam jangka panjang. Proporsi belanja modal yang lebih besar menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam pembangunan, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan daerah (Rihan, 2025).

Namun, efektivitas belanja modal sangat bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, karena ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan memiliki sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). Dana ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi otonomi daerah. Hal ini menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan tersebut diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan umumnya menggunakan analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan yang dihasilkan. Selain itu, tingkat kemandirian daerah menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kinerja keuangan. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi cenderung lebih mampu mengelola keuangan secara optimal tanpa bergantung pada bantuan pusat. Oleh karena itu, kombinasi antara peningkatan PAD, pengelolaan dana perimbangan yang efisien, serta kemandirian fiskal yang kuat menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan (Putri et al., 2025).

Menurut Said & Bakar (2021), dana perimbangan merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai instrumen fiskal untuk mendukung desentralisasi, sekaligus mengurangi kesenjangan kapasitas keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haga et al., (2024), dana perimbangan dijelaskan sebagai alat dalam pemerataan fiskal yang bertujuan mendukung daerah dengan kemampuan keuangan terbatas, sehingga tetap mampu memenuhi standar layanan publik dasar serta pembangunan infrastruktur yang esensial.

Oleh karena itu, meskipun dana perimbangan penting dalam mendukung keuangan daerah, penggunaannya perlu diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan maupun operasional secara mandiri tanpa bergantung secara besar pada bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatannya sendiri. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian tersebut adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah, yang mencerminkan kontribusi pendapatan lokal dalam struktur keuangan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan (Rihan, 2025).

Kemandirian daerah menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara independen tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pengukurannya sering dilakukan melalui rasio PAD terhadap total pendapatan daerah atau terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi

PAD, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa daerah mampu menggali potensi ekonominya secara optimal untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah belum berkembang secara maksimal. Dalam konteks ini, belanja modal memainkan peran strategis sebagai variabel yang dapat memperkuat kemandirian fiskal regional (Ayuningtyas et al., 2025).

Belanja modal meliputi investasi pemerintah dalam aset tetap seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan layanan sosial, yang memiliki dampak jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi regional. Berbeda dengan pengeluaran operasional, belanja modal menciptakan efek pengganda pada aktivitas ekonomi lokal, memperluas basis pajak, dan meningkatkan PAD di masa depan. Dengan demikian, efektivitas belanja modal dapat berfungsi sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara PAD, Dana Penyeimbang, dan kemandirian fiskal regional (Okonkwo et al., 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Ketergantungan yang besar terhadap dana transfer pusat juga berpotensi menurunkan motivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan tingkat kemandirian daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan, karena dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif, inovatif, serta optimal dalam menggali potensi sumber pendapatan dan meningkatkan kualitas pengeluaran daerah (Wijanarko & Ardiansyah, 2025).

Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah, yang menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Sebaliknya, rendahnya kemandirian menunjukkan adanya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Sururi, 2025).

Penelitian Yulis et al., (2022) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal yang rendah membuat pemerintah daerah kurang leluasa dalam mengelola anggaran, karena harus mengikuti ketentuan penggunaan dana transfer dari pusat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, tingkat kemandirian daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kekuatan fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisa dampak belanja modal, dana transfer pemerintah pusat ke daerah (perimbangan), dan fungsi kemandirian keuangan daerah untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam. data sekunder yang digunakan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Batam selama periode 2022–2024, data dikeluarkan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam.

Populasi yang telah ditentukan dengan peneliti menggunakan data APBD Pemerintah Kota Batam dalam periode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, di mana seluruh data yang tersedia dijadikan sebagai sampel penelitian (Prastiwi & Aji, 2020). Data yang dianalisis mencakup laporan audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat dianggap memiliki tingkat validitas yang baik.

Kinerja keuangan daerah digunakan oleh peneliti sebagai variabel. Kinerja ini diukur melalui rasio efektivitas yang dibuat dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan (Devinci Antasena et al., 2023). Peneliti menggunakan belanja modal yang diukur berdasarkan proporsinya terhadap total belanja daerah, dana perimbangan yang diukur dari kontribusinya terhadap total pendapatan daerah, tingkat kemandirian daerah sebagai variabel independen. Peneliti menggunakan variabel ini diukur melalui rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (Sururi, 2025).

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam mengolah data pengumpulan. Analisa data yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum data, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Peneliti juga menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dengan fungsi uji model yang digunakan telah memenuhi kriteria statistik penelitian (Prastiwi & Aji, 2020).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa pendekatan statistik untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial diukur dengan uji t. Pengaruh total variabel independen terhadap kinerja keuangan daerah diukur dengan uji F. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menentukan seberapa baik model penelitian dapat menjelaskan perubahan dalam kinerja keuangan daerah. Semua pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data penelitian, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel. Dengan menggunakan analisis ini, peneliti dapat memahami kondisi dan pola data sebelum melanjutkan ke tahap pengujian yang lebih mendalam. Kinerja keuangan daerah berfungsi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, dan belanja modal, dana perimbangan, dan tingkat kemandirian daerah berfungsi sebagai variabel independen.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel Statistik Deskriptif, diketahui bahwa variabel kinerja keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,636 dan maksimum sebesar 1,202 dengan nilai rata-rata sebesar 0,93464 serta standar deviasi sebesar 0,155949. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam selama periode penelitian berada pada kategori cukup baik dengan variasi data yang relatif kecil.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Uraian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keua ng an Daerah	12	0,636	1,202	0,93464	0,155949
Belanja Mo dal	12	0,006	0,128	0,4783	0,040024
Dana Perimbangan	12	0,007	0,225	0,10580	0,079155
Tingkat Kemandirian Daerah	12	0,002	0,395	0,11900	0,159469

Tabel menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai rata-rata yang berada di antara nilai minimum dan maksimum, yang menunjukkan bahwa data penelitian menunjukkan variasi yang cukup besar. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa data dapat dianggap cukup stabil untuk analisis lebih lanjut.

Berdasarkan tabel 1, variabel kinerja keuangan daerah memiliki jumlah data (N) sebanyak 12 dengan nilai minimum sebesar 0,636 dan nilai maksimum sebesar 1,202. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,93464 menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas realisasi PAD terhadap target PAD Pemerintah Kota Batam selama periode penelitian berada pada kisaran 93,46%. Nilai standar deviasi sebesar 0,155949 menunjukkan bahwa variasi data

kinerja keuangan daerah relatif kecil sehingga penyebaran data relatif homogen atau tidak terlalu menyebar.

Sedangkan pada belanja modal variabel belanja modal memiliki jumlah data (N) sebanyak 12 dengan nilai minimum sebesar 0,006 dan nilai maksimum sebesar 0,128. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,04783 menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah relatif kecil. Nilai standar deviasi sebesar 0,040024 menunjukkan adanya variasi dalam proporsi belanja modal antar jenis belanja dan antar tahun selama periode penelitian.

Pada Dana Perimbangan variabel dana perimbangan memiliki jumlah data (N) sebanyak 12 dengan nilai minimum sebesar 0,007 dan nilai maksimum sebesar 0,225. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,10580 menunjukkan bahwa dana perimbangan memberikan kontribusi sekitar 10,58% terhadap total pendapatan daerah. Nilai standar deviasi sebesar 0,079155 menunjukkan bahwa terdapat variasi kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah selama periode penelitian.

Variabel tingkat kemandirian Daerah, memiliki jumlah data (N) sebanyak 12 dengan nilai minimum sebesar 0,002 dan nilai maksimum sebesar 0,395. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,11900 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Nilai standar deviasi sebesar 0,159469 menunjukkan adanya variasi kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal.

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas

	Signifikansi (p)	Keterangan
<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	0,079	Normal

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27, peneliti 2026

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p) = 0,079, yang berarti nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
X1	1.502	0,666	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X2	1.235	0,810	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X3	1.352	0,740	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27, peneliti 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, sehingga variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat ketidakseimbangan varians pada residual model regresi, digunakan uji heteroskedastisitas.

Tabel 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Variabel	Koefisien (B)	Sig.	Keterangan
X1	-2.569	0.027	Terjadi Heteroskedastisitas
X2	-1.719	0.004	Terjadi Heteroskedastisitas
X3	-0.498	0.059	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27, peneliti 2026

Berdasarkan hasil pengujian, pola tertentu pada grafik scatterplot atau nilai signifikansi tidak ditemukan lebih dari 0,05 pada uji Glejser. Kondisi ini menunjukkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi yang diperlukan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi mengetahui dampak belanja modal, dana perimbangan, dan tingkat kemandirian daerah dengan hasil kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam.

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda

Var ia bel	Ko efi si en Re gre si (B)	t	Sig.
Konstanta	1.299	13.294	<0.001
Belanja Moda l	-2.569	-2.704	0.027
Dana Perimbangan	-1.719	-3.945	0.004
Tingkat Kemandirian Daera h	-0.498	-2.201	0.059

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27, peneliti 2026

Berdasarkan analisis regresi, data hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, namun dengan kecenderungan hubungan yang bersifat negatif. Sedangkan tingkat kemandirian daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal dan dana perimbangan dalam jangka pendek cenderung diikuti dengan penurunan kinerja keuangan, sementara tingkat kemandirian daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Tabel 6
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Va ria bel In dep end en	t hit ung	Sig.	Keterangan
Belanja Modal	-2.704	0.027	Berpengaruh Signifikan
Dana Perimbangan	-3.945	0.004	Berpengaruh Signifikan
Tingkat Kemandirian Daerah	-2.201	0.059	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27, peneliti 2026

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- a. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
- b. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
- c. Tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan nilai signifikansi masing-masing variabel, dimana dua variabel memiliki nilai di bawah 0,05, sedangkan satu variabel berada di atas 0,05.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 7

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F Hitung	Sig.
Regresi	5.756	0.021

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27, peneliti 2026

Dalam nilai uji F, nilai yang dihasilkan signifikansi sebesar 0,021 ($< 0,05$), bahwa belanja modal, dana perimbangan, dan tingkat kemandirian daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi berfungsi mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 8

Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.827	0.683	0.565

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27, peneliti 2026

Dari hasil angka hasil analisis, nilai R² yang dihasilkan 0,683, bahwa 68,3% variasi kinerja keuangan dapat berkaitan dengan belanja modal, dana perimbangan, dan tingkat kemandirian daerah. Namun, 31,7% terakhir dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan uji penelitian, bahwa belanja modal dan dana perimbangan memiliki dampak dan saling mempengaruhi secara signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam dengan arah hubungan yang negatif. Peningkatan pada kedua komponen tersebut belum secara langsung berdsarakan peningkatan efektivitas kinerja keuangan daerah. Sementara itu, tingkat kemandirian daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum mampu memberikan dampak yang kuat terhadap perbaikan kinerja keuangan secara langsung.

Secara keseluruhan, ketiga variabel yaitu belanja modal, dana perimbangan, dan tingkat kemandirian daerah terbukti berpengaruh secara simultan pada kinerja keuangan daerah. Tentu saja kinerja keuangan juga dipengaruhi dari beberapa faktor lainnya dan juga hasil dari kombinasi berbagai aspek pengelolaan fiskal daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan belanja modal agar memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kinerja keuangan. Selain itu, upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan perlu dilakukan secara bertahap melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, baik melalui optimalisasi pajak daerah maupun inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang hanya mencakup periode waktu yang relatif singkat dan terbatas pada satu daerah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode penelitian, menambahkan variabel lain yang relevan, serta melakukan perbandingan antar daerah agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Ayuningtyas, R., Nuha, G. A., & Zulkarnaeni, A. S. (2025). Determinants of regional financial independence: A study of local taxes, balancing funds, and capital expenditure in East Java (2020–2023). *Vol. 18*(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v18i1.31712>
- Azis, R. F., & Husna, N. (2021). Analisis derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2018–2020. *9*(3), 241–256.
- Devinci Antasena, Y. C., & Silawati, D. (2023). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *1*(3), 51–70. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v1i3.49>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Two decades of fiscal decentralization implementation in Indonesia* (U. S. H. & D. Puspita, Eds.). https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1670915701_2_dekade_desentralisasi_fiskal_letter_-_eng.pdf
- Haga, R., Nugroho, S., Bancin, J. B., & Christmas, A. F. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, terhadap belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, *1*(4), 127–141. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/article/view/633/1015>
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Provinsi Bali 2014–2018. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *9*(3), 1109.

- Miar, Zakiah, W., Giovanni, J., & T, S. C. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 18(1), 72–88.
- Okonkwo, O. N., Ojima, D., Richard, O., Echeta, D., & Ejike, D. (2023). Impact of government capital expenditure on the economic growth rate of Nigeria.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Putri, A. E., Sopiyan, & Nurhasana. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Vol. 1*(No.). <https://doi.org/10.63822/z2q2pn58>
- Rihan, S. A. V. (2025). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera.
- Said, S., & Bakar, A. (2021). Analisis tingkat kemandirian. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1–20.
- Sururi, A. (2025). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2020–2023. *Jesya*, 8(1), 111–122. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1792>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Wijanarko, F., & Ardieansyah. (2025). Dinamika demografi dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. *Volume 5*(N.). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Yulis, D. Y. M., Kornita, S. E., & Widayatsari, A. (2022). Analisis kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi. *Menara Ilmu*, 16(2), 22–54. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3787>